

PERAN PENTINGNYA PENDIDIKAN BAGI MASYARAKAT LAMPUNG DI ERA GLOBASLISASI

Fuadul Umam¹, Nur Wildan Safrudin², Alanuari, M.A³.

¹Program Studi, Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

²Prgram Studi, Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

³Prgram Studi, Sejarah Peradaban Islam Fakultas Islam Nusantara
Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

fuadulumam@unusia.ac.id, nurwildansafrudin@gmail.com, alanuarialanuari@unusia.ac.id

Abstrak

Lampung merupakan salah satu daerah di Indonesia dengan sumber alam yang melimpah, bukti tersebut masih dapat kita lihat sampai sekarang. Wilayah Lampung menjadi ujung pangkal bagi masyarakat pulau Sumatera yang akan ke pulau Jawa, begitu pula sebaliknya. Lampung juga menjadi daerah yang pernah disinggahi oleh pemerintah kolonial pada saat itu. Dengan kondisi sumber daya alam tersebut menjadi faktor masyarakat setempat tidak melanjutkan sekolah, dan dengan minimnya sosialisasi dari pemerintah mengenai pendidikan.

Kata kunci:

Sumber Daya Alam, Kolonial, Sosialisasi Pendidikan.

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu sarana mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam mengarungi kehidupan. Dewasa ini, pendidikan tampil sebagai salah satu prasyarat utama dalam melamar suatu pekerjaan. Penduduk Indonesia sudah mengenal sistem pendidikan jauh sebelum kedatangan dan dominannya dominasi penjajahan bangsa Barat. Sistem pendidikan yang berkembang di Nusantara merupakan sistem pendidikan agama Islam dalam berbagai bentuk pengajarannya (sistem pondok pesantren, langgar atau surau) hal yang tentunya berbeda dan terasaasing bagi bangsa Barat di Nusantara.

Sebagaimana yang kita pahami bersama bahwa terdapat stigma dan kecenderungan untuk menilai bahwa tidak ada sesuatu hal yang baik yang telah dilakukan Pemerintah Kolonial Belanda selama menguasai dan menjajah wilayah Nusantara. Meskipun demikian, perkembangan pendidikan di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari pengaruh dan campur tangan pemerintah kolonial Belanda, sehingga masih dapat kita maknai sebagai tindakan untuk mengangkat derajat penduduk bumiputera.(P. D. H. A. N. M.A, 2014)

Terlaksananya sebuah kebijakan politik pendidikan memiliki landasan dasar dalam praktek pelaksanaannya. Aturan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan bagi penduduk pribumi sudah dimulai sejak tahun 1818 dimana setiap penduduk diperbolehkan masuk ke sekolah-sekolah Belanda dengan syarat dan ketentuan yang diatur pemerintah. Meskipun demikian, jumlah penduduk pribumi yang mampu mengenyam pendidikan masih dalam skala yang terbatas dengansiswa yang terbatas. Siswa yang dapat mengenyam pendidikan hanya diwakili dan terlihat pada golongan bangsawan, elite lokal dan pemeluk Kristen.(D. J. M. M.A, 2021)

Terbatasnya siswa ini akibat dari akses pendidikan yang hanya dinikmati oleh kalangan elite kerajaan dan bangsawan pribumi. Pembatasan terakhir pada akhirnya hilang pada tahun 1863, melalui kebijakan Menteri Frans v.d Putte seorang tokoh liberal, dengan ketetapan bahwa setiap penduduk pribumi berhak memperoleh kesempatan pendidikan.

Perkembangan pendidikan pada pertengahan abad ke-19 menunjukkan sebuah dinamika dan perkembangan yang menggembirakan dengan peningkatan pendirian sekolah mencapai 4 kali lipat jumlah sekolah dalam kurun waktu 28 tahun terakhir. Keterbutuhan akses terhadap layanan pendidikan, kemudian diikuti dengan perluasan sekolah-sekolah telah mengakibatkan terjadinya persoalan dalam hal pendaanaan dan penyediaan tenaga

guru di berbagai wilayah di Nusantara. Keterbatasan dana dan pemerintah kolonial Belanda kemudian melahirkan sistem pendidikan kelas 2 dengan bahasa pengantar yakni bahasa Melayu dan daerah sebagai bahasa pengantar pendidikan. Pada waktu itu penyelenggaraan pendidikan pada jenjang sekolah dasar bagi penduduk pribumi secara garis besar terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Sekolah Dasar Kelas Satu (*De School der Eerste klasse*). Secara umum sekolah berada di ibukota karesidenan, dan kewedanaan, hingga kecamatan, dan di kota-kota yang menjadi pusat-pusat perdagangan dan perekonomian. Siswa yang memiliki akses dan bersekolah ialah anak dari golongan masyarakat atas, bangsawan, tokoh terkemuka, dan kelompok bumiputera yang memiliki kedudukan terhormat pada lingkungan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan tujuan dari sekolah sebagai pemenuhan kebutuhan pekerja pada lembaga administrasi pemerintahan, perusahaan swasta, dan perdagangan. Masa belajar pada Sekolah Kelas Satu adalah 3 tahun, dengan bahasa pengantar menggunakan bahasa Melayu dan bahasa daerah, tetapi dan secara bertahap kemudian diganti dengan bahasa Belanda.
2. Sekolah Dasar Kelas Dua (*De Schoolen der Tweede Klasse*). Sekolah Kelas Dua didirikan di distrik-distrik atau desa-desa (*marga*) sehingga disebut juga Sekolah Desa. Pendirian sekolah ini memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan masyarakat umum. Dengan kata lain, sekolah tersebut disediakan bagi anak-anak pribumi dengan tujuan untuk mendidik calon-calon pegawai rendah (Tanjung, 2018). Lama belajar pada Sekolah Dasar Kelas Dua adalah lima tahun. Perbedaan antara jenjang Sekolah Kelas Satu dan Sekolah Kelas Dua dapat dilihat dari tempat atau lokasi sekolah dan latar belakang sosial ekonomi siswa yang menjadi pelajar. Dapat dilihat juga dari lama belajar, kurikulum, tenaga pengajar, dan uang sekolah (Karsiwan et al., 2021).

Pendirian fasilitas di sekolah dan sarana penunjang pendidikan lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda pada dasarnya memiliki tujuan untuk menjadikan penduduk pribumi agar dapat mengabdikan pada kepentingan kolonial Belanda. Penyelenggaraan pendidikan dengan kata lain bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja yang mampu membaca dan menulis pada lembaga administrasi pemerintah kolonial dan pada akhirnya dapat digunakan sebagai alat untuk memperkuat status dan kedudukan

penjajah kolonial Belanda. Para pekerja lulusan sekolah ini kemudian mengabdikan kepada kepentingan Belanda, karena itu tujuan pendidikan diarahkan kepada kepentingan kolonial, sehingga isi pendidikan hanya sekedar transfer ilmu pengetahuan, wawasan dan keterampilan yang dapat berguna membantu dan mempertahankan kekuasaan elite politik dan ekonomi penjajah. (Suardi, 2015)

KAJIAN TEORI

Perkembangan Pendidikan di Indonesia

Perkembangan pendidikan di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari keinginan dan usahayang berhasil dari perjuangan Partai Liberal di Negeri Belanda. Meskipun demikian pada umumnya Kaum Liberal belum merasa puas dengan Peraturan Pemerintah 1854. Peraturan itu sama sekali tidak menyebut masalah pembiayaan untuk daerah jajahan, meskipun tampak adanya perluasan hampir di setiap kota yang biayanya tidak lebih dari yang ditentukan yaitu 25.000 guldensetahun. Dengan adanya perluasan pendidikan tersebut jelas memerlukan tenaga pengajar. Tidak mungkin pemerintah mendatangkan tenaga pengajar dari Negeri Belanda. Karena itu tenaga pengajar harus diambilkan dari penduduk pribumi. Pertimbangan ini dirasa perlu sekali oleh pemerintah jajahan untuk mendirikan sekolah keguruan (Feillard, 1999)

Sejak tahun 1848 Gubernur Jenderal telah memiliki otoritas dan kuasa untuk menggunakan anggaran keuangan sebesar f. 25.000/tahun untuk digunakan dalam pendirian sekolah-sekolah untuk kalangan orang Jawa, teristimewa bagi pendidikan pegawai-pegawai bangsa pribumi. Anggaran pendidikan bagi penduduk pribumi pada tahun 1905 dimana didalamnya termasuk tunjangan untuk sekolah-sekolah swasta sebesar f 2 juta, sehingga apabila dibagi jumlah penduduk yang menikmati sekolah sebanyak 40 juta penduduk, maka anggaran pendidikan untuk penduduk pribumi hanya 5 sen per orang.

Karesidenan Lampung pada awalnya merupakan suatu daerah mandiri dengan kepemimpinan marga dengan punyimbang sebagai pemimpinnya, kemudian beralih menjadi daerah bawahan kesultanan Banten sejak para punyimbang melakukan seba ke Banten dan berakhir dengan pengakuan pemimpin wilayah Lampung terhadap kekuasaan Kesultanan Banten.⁷ Estafet kepemimpinan atas wilayah Lampung kemudian beralih pada Belanda sejak Daendles menghapuskan Kesultanan Banten pada 21 November

1808".(Karsiwan et al., 2021)

Karesidenan Lampung ketika berada di bawah kekuasaan Belanda dan disaat yang bersamaan kondisi sosial, dan ekonomi masyarakat Jawa menunjukkan gejala penurunan kesejahteraan dan kemakmuran sebagai akibat dari penambahan jumlah penduduk, dan semakin terbatasnya lapangan pekerjaan menyebabkan terjadinya kemiskinan, pengangguran dan kriminalitas. Kondisi ini menyebabkan pemerintah kolonial Belanda mendapatkan kecaman dan kritik dari para pejuang kemanusiaan dan liberal di Negeri Belanda agar memperhatikan kondisi masyarakat jajahan. "Tokoh-tokoh yang mengkritik tersebut antara lain Van Deventer, Van Koll dan P. Brooshooff serta Baron Van Hoevell anggota parlemen Belanda yang mendesak pemerintah untuk menjalankan politik balas budi terhadap penduduk pribumi atas keuntungan yang diperoleh dari tanah jajahan di Hindia Belanda.

Kebijakan etis berangkat dari pernyataan Ratu Wilhelmina di dalam pidatonya yang disampaikan pada tahun 1901 menyatakan bahwa, pemerintah kolonial akan melakukan perbaikan nasib penduduk pribumi Indonesia, melalui tiga kebijakan politiknya, yaitu: perluasan pendidikan (edukasi), pembangunan pertanian (irigasi), dan pemindahan penduduk (emigrasi).¹⁰ Kebijakan ini kemudian dikenal secara luas sebagai kebijakan politik etis (politik kemanusiaan).(Wildana, 2018)

Tindak lanjut dari pidato itu dan mencermati isu tentang keadaan ekonomi penduduk sebagai dampak dari politik tanam paksa dan liberal, pada tahun itu juga Ratu Belanda menganjurkan supaya diadakan penelitian di berbagai bidang kehidupan. Kebijakan balas budi ini bertujuan untuk memperbaiki dan menangani perbaikan kualitas hidup penduduk Jawa dengan melakukan berbagai langkah diantaranya perbaikan jalan desa, pelayanan pendidikan dan kesehatan, pembuatan jaringan irigasi sebagai penunjang keberhasilan pertanian, pemerataan jumlah penduduk dari yang padat (Jawa) ke daerah yang jarang (luar Jawa)(Hakim, n.d.).

Pelaksanaan kolonisasi pertama di Karesidenan Lampung dilaksanakan dengan ujicoba penempatannya di Bagelen (1905), Wonosobo (1922), Trimurjo (1932), dan Sukadana (1932). Pemindahan penduduk Jawa ini menggunakan jalur laut, setelah dilakukan pendataan dan pengecekan kesehatan calon kolonis. Kolonis asal Jawa

kemudian tiba di Lampung melalui pelabuhan Panjang yang terletak di pesisir selatan wilayah Lampung, dekat dengan ibukota Karesidenan Lampung(Hakim, n.d.)



Gambar 1.

Kedatangan Kolonis asal Jawa di Pelabuhan Panjang, Lampung.

Pemindahan penduduk dari Jawa ke Lampung ini cukup beralasan selain daerah yang dekat dengan Pulau Jawa, jauh sebelum itu telah terjadi perpindahan penduduk asal Banten sebagai buruh pemetik lada pada perkebunan milik penduduk asli. Daerah Bagelan dipilih selain karena lokasinya tidak jauh dari ibukota Karesidenan, ketercukupan dan ketersediaan air sebagai prasyarat pertanian padi di sawah di daerah ini dapat dikatakan tercukupi berdasarkan laporan *Schalkwijk*.

Selain itu, dapat dikatakan bahwa daerah-daerah Karesidenan Lampung pada pertengahan abad ke-19 merupakan wilayah yang tingkat kepadatan penduduknya masih rendah. “Jumlah penduduk pada waktu itu tidak lebih dari 80 ribu jiwa pada wilayah yang luasnya 29.365 kilometer persegi. Kepadatan penduduk tidak sampai 3 juta jiwa/km².

Proses pemindahan penduduk ini pada kenyataannya disinyalir menjadi sarana untuk mendatangkan pekerja untuk dijadikan buruh yang dapat dipekerjakan pada daerah-daerah perkebunan atau daerah pertambangan milik Belanda. Kondisi terlihat pada penempatan para kolonis disekitar perkebunan swasta milik Belanda, dan atau ditempatkan diantara lokasi penduduk asli Lampung (seperti Bagelen yang terletak diantara Teluk Betung dan Kota Agung, lokasi kolonisasi Trimurdjo terletak diantara Tegineneng dan Sukadana). Perhatian pemerintah kolonial terhadap masalah kolonisasi semakin besar ketika adanya tuntutan penghapusan Poenale.

Sanksi di awal tahun 1920an oleh parlemen Belanda. “Poenale Sanksi merupakan

suatu peraturan yang mengatur tata cara pemberian hukuman kepada para pekerja perkebunan yang melanggar aturan kerja. Pemerintah kolonial Belanda menggiatkan pembangunan jaringan irigasi di daerah Pringsewu tahun 1927 sebagai pendukung pertanian masyarakat pada kolonisasi Bagelen di Gedong Tataan. Kemudian dilanjutkan dengan pembangunan irigasi Argoguruh tahun 1935 sebagai pendukung kolonisasi Trimurjo-Sukadana. Kajian mengenai rencana pembangunan dan pengembangan jaringan irigasi telah dilakukan pada masa Schalkwijk yang bertugas sebagai pimpinan kolonisasi telah dilakukan berbagai perencanaan dan kajian untuk pembuatan jaringan irigasi (talang) di sebelah utara Sungai Way Tebu yang merupakan sebuah sungai yang terdapat di daerah Pringsewu, Lampung.

Proses pembangunan jaringan irigasi pada praktek pelaksanaannya melibatkan penduduk asli dan para kolonis yang sengaja ditempatkan diantara pemukiman penduduk asli. Proses pengerjaan pemantauan pengerjaan dilakukan melalui para kepala desa yang dikuatkan melalui peraturan pemerintah lewat peraturan Heerendiensten.



Gambar 2.

Bendungan saluran Irigasi Dekat Metro, Lampung.

Sumber : Circa. Stuwdam in de buurt van Metro, Lampongs. Leiden University Libraries, 1935.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode sejarah dengan tahapan penelitian meliputi heuristik, verifikasi data (kritik intern dan ekstern), interpretasi dan historiografi. Pada tahap heuristik atau pengumpulan data, penulis mencari dan menghimpun berbagai sumber, informasi, yang berasal dari masa lampau yang memiliki keterkaitan dengan fokus penelitian yang sedang diteliti.

Sumber data yang telah terkumpul kemudian dilakukan verifikasi data melalui kritik

intern dan ekstern, untuk melihat keaslian dan kredibilitas sumber data sejarah yang didapatkan (Kuntowijoyo, 2013: 77-78). Hal ini dilakukan agar data tidak serta merta diterima begitu saja tetapi telah melalui serangkaian uji data.

Pada tahap interpretasi sumber-sumber primer yang telah didapatkan dibandingkan sumber-sumber lain baik sekunder ataupun tersier. Hal ini dilakukan agar tidak ada kesalahan pemaknaan. Pada tahap ini peneliti berupaya untuk mengkaitkan antara fakta yang satu dengan fakta lainnya, sehingga diperoleh sebuah gambaran peristiwa secara utuh dan kronologi serta saling berkaitan antara politik etis dan perkembangan pendidikan di Lampung. Tahap terakhir historiografi yaitu penulisan sejarah. Penulisan sejarah disusun secara kronologis dengan memperhatikan aspek kausalitas narasi hasil temuan mengenai kebijakan etis pemerintah kolonial Belanda di Lampung tahun 1905-1942.

HASIL PENELITIAN

Karesidenan Lampung pada awalnya merupakan daerah dibawah Kesultanan Banten kemudian beralih ke pemerintah kolonial Belanda sejak kesultanan Banten dihapuskan Daendels. Kebijakan Pemerintah kolonial Belanda semasa menguasai Lampung pada masa politik etis terdiri dari pemindahan penduduk (kolonisasi), pendirian sekolah-sekolah (edukasi), dan pembangunan saluran irigasi.

Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat Lampung di masa mendatang, dengan adanya pendidikan yang dikenyam oleh masyarakat Lampung membuat sumber daya alam yang terdapat di wilayah tersebut dijadikan sebagai penghasilan yang ke depannya bisa menjadi langkah persiapan pendidikan dan kesejahteraan penerusnya.

Hal ini dilakukan dengan melibatkan mahasiswa dan dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat di daerah Lampung. Pengabdian ini didanai oleh internal universitas untuk merangsang dosen dan mahasiswa dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat, juga memotivasi masyarakat Lampung yang masih minim mengenyam dunia pendidikan.

Pelaksanaan sosialisasi dalam pentingnya pendidikan bagi warga Lampung sangat bermanfaat untuk kelangsungan pendidikan kedepan. Pembahasan yang dilakukan meliputi

mengunjungi rumah-rumah warga yang notabeneanya tidak mengenyam pendidikan baik formal maupun non-formal. Kata pendidikan masih jauh dari pemikiran dan dalam harapan mereka, maka dari itu kita sebagai akademisi bertanggung jawab untuk menyadarkan betapa pentingnya pendidikan di masa sekarang.

Karena arus globalisasi yang semakin kencang akan membawa masyarakat ke dalam kekurangan pengetahuan akan dunia industri, dan membuat masyarakat Lampung tertinggal dari daerah lainnya yang ada di Indonesia. Tidak hanya itu, pendidikan juga dalam hal lain dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan di masyarakat. Dunia yang sudah menginjak dunia industri 4.0 memaksa kita untuk mengikuti apa yang sudah diterapkan dalam masyarakat banyak pada umumnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa, tentang pentingnya pendidikan di era globalisasi yang terdapat di daerah Lampung menjadikan beberapa catatan:

- a. Masalah ekonomi menjadi alasan utama yang kita temui waktu sosialisasi, mereka kesulitan akan ekonomi yang akhirnya harus bekerja keras untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Pembentukan karakter bekerja oleh lingkungan membuat generasi muda tidak diberikan kesempatan berpikir jernih untuk melanjutkan pendidikan.
- b. Lingkungan juga mempengaruhi, dalam hal ini masyarakat sekitar menjadi pengaruh yang membuat generasi muda tidak melanjutkan pendidikan. Arus negatif yang selalu terjadi dalam lingkungan menimbulkan generasi penerus enggan untuk belajar dan sekolah, walaupun mereka sadar akan kesejahteraan yang diperoleh dalam keluarganya yang kurang mampu. Akan tetapi tidak membuat generasi penerus sadar diri dan melakukan perubahan dalam dirinya.
- c. Sekolah yang jarak tempuhnya sangat jauh. Alasan ini merupakan yang selalu dipakai oleh generasi penerus. Jarak tempuh yang jauh membuat malas anak-anak untuk sekolah, ditambah alasan lain yaitu kendaraan umum yang masih

minim beroperasi dan bahkan tidak ada. Faktor ini dapat mengurungkan niat yang sudah bulat untuk sekolah.

Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya, maka penulis memberikan masukan berupa saran, sebagai berikut :

Bagi Pemda lampung

Perkembangan Pendidikan di suatu daerah bisa menjadi Tolak Ukur Perkembangan Ekonomi di suatu daerah oleh sebab itu Hendaklah pemerintah daerah Harus melakukan sinergi dan bijak dalam hal ini, dan pemerintah menjadi Garda terdepan dalam mendukung pendidikan di suatu daerah yang di pimpinnya dengan membangun jaringan infrastruktur jalan dan akses menuju lembaga pendidikan serta mendukung dinas –dinas pendidikan di daerah terkait dengan mensupport Sumber daya manusia nya dalam perkembangan pendidikan di masa-masa yang akan datang.

Bagi Peneliti

Diharapkan penelitian ini memberikan acuan bagi penelitian selanjutnya. Terutama bagi peneliti yang akan meneliti seputar Perkembangan Pendidikan di suatu daerah terutama Perkembangan Pendidikan di daerah lampung khususnya dan perkembangan pendidikan di Indonesia Umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Feillard, A. (1999). *NU vis a vis Negara ; Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*. Lkis Pelangi Aksara.
- Hakim, L. A. (n.d.). *ISU-ISU ISLAM KONTEMPORER (Politik Islam, Pendidikan, dan Islam Sosial)*. 230.
- Heerendiensten merupakan aturan kerja sukarela yang menjadi wajib kerja masa kolonial Belanda diberbagai wilayah di Indonesia. Untuk wilayah Lampung, aturan Heerendiensten dapat dilihat pada Staatsblad Van Nederlandsch-Indie No. 407 Tahun 1919 dan Staatsblad Van Nederlandsch-Indie No.438, Tahun 1931.
- Karsiwan, K., Sari, L. R., & Sari, L. R. (2021). Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda pada Masa Politik Etis di Lampung. *Tsaqofah Dan Tarikh: Jurnal*

Kebudayaan Dan Sejarah Islam, 6(1), Article 1.
<https://doi.org/10.29300/tjksi.v6i1.4375>

M.A, D. J. M. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan: Pendidikan di Era Revolusi Industri 4.0*. Prenada Media.

M.A, P. D. H. A. N. (2014). *Sejarah Pendidikan Islam*. Kencana.

Suardi, M. (2015). *Ideologi Politik Pendidikan Kontemporer*. Deepublish.

Tanjung, M. (2018). *Dinamika lembaga pendidikan islam di sumatera timur pada tahun 1892-1942* [Doctoral, universitas islam negeri sumatera utara].
<http://repository.uinsu.ac.id/4677/>

Wildana, I. (2018). *Pemikiran Soekarno Tentang Ekonomi Indonesia Tahun 1932-1965*.
<https://repository.unej.ac.id/xmlui/handle/123456789/86582>